

The Effect Of Understanding Government Accounting Standards And The Utilization Of Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Statements With Human Resource Competence As A Moderation Variable In The Asahan Regency Government

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Di Pemerintahan Kabupaten Asahan

Register Launli Buaya ¹⁾, Oktarini Khamilah Siregar ²⁾, Agus Tripriyono ³⁾
^{1, 2, 3)} Master of Accounting Study Program, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia
 Email: ¹⁾ registerbuaya@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 Januari 2026]
 Revised [28 April 2026]
 Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Accounting Standards,
 Accounting Information,
 Financial.

This is an open access article
 under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual. Namun, tantangan masih muncul terkait konsistensi penerapan standar, pemanfaatan teknologi informasi, serta kesesuaian kompetensi aparatur pengelola keuangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Instrumen berupa kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat pemahaman responden terhadap SAP, intensitas dan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, serta persepsi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Analisis dilakukan menggunakan teknik Moderated Regression Analysis untuk menguji peran kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, terutama dalam aspek ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan data. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia terbukti memoderasi hubungan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan serta pemanfaatan sistem informasi dengan kualitas laporan keuangan, di mana kompetensi yang lebih tinggi mampu memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan optimalisasi sistem informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of understanding Government Accounting Standards and the utilization of accounting information systems on the quality of financial statements in the Asahan Regency Government, with human resource competence as a moderating variable. The study is motivated by the need of local governments to produce financial reports that are reliable, relevant, and compliant with accrual-based accounting principles. However, challenges persist regarding the consistency of standard implementation, the effectiveness of information system utilization, and the adequacy of competencies among financial management personnel. This research employs a quantitative approach using a survey distributed to government officials involved in financial statement preparation. A questionnaire was used to collect data on respondents' comprehension of SAP, the intensity and effectiveness of accounting information system usage, and their perceptions of financial report quality. The analysis was conducted using Moderated Regression Analysis (MRA) to examine the role of human resource competence as a strengthening or weakening factor in the relationships among variables. The results indicate that understanding SAP has a significant positive effect on the quality of financial statements. The use of accounting information systems also contributes significantly to improving financial information quality, particularly in aspects of timeliness, accuracy, and completeness. Furthermore, human resource competence was found to moderate the relationship between SAP understanding and information system utilization with financial report quality, where higher competence strengthens the effect of both variables. These findings emphasize the importance of capacity building through continuous training and optimization of information systems to support financial transparency and accountability in regional governments.

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Asahan, diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan regulasi, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi keuangan secara andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, terutama pemahaman aparaturnya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.

Pemahaman aparaturnya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menjadi faktor fundamental dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan tidak hanya membutuhkan pengetahuan teknis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, tetapi juga memerlukan pemahaman konseptual mengenai karakteristik akuntansi pemerintahan. Menurut Pratama (2018), rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sering bersumber dari ketidaksesuaian penerapan standar akibat lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kognitif aparaturnya dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pemerintah telah mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses pencatatan, pengelolaan data, dan penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Menurut Yuliani (2020), sistem informasi akuntansi berperan sebagai instrumen yang mampu mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan konsistensi data, dan mempermudah proses audit internal maupun eksternal. Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah yang menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dituntut untuk mengoptimalkan teknologi tersebut dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Namun keberhasilan pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan sistem serta tingkat kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan desain sistem itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan maupun pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kompetensi dalam konteks ini mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan analitis yang diperlukan dalam mengelola informasi keuangan secara profesional. Menurut Wibowo (2019), tingginya kompetensi sumber daya manusia birokrasi merupakan kunci keberhasilan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah karena kompetensi yang memadai mampu meningkatkan ketepatan prosedural dan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks moderasi, kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Aparaturnya yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya mampu memahami standar akuntansi secara mendalam, tetapi juga dapat mengoperasikan sistem informasi dengan lebih efektif dan efisien.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat kesenjangan empiris terkait konsistensi temuan mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan, seperti dikemukakan oleh Suryani (2018) yang menemukan bahwa pemahaman aparaturnya terhadap standar akuntansi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penyajian laporan keuangan sesuai regulasi. Namun penelitian lain oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan, terutama jika tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dirancang untuk menguji pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, serta menguji peran kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran hubungan antarvariabel secara terukur, objektif, dan berbasis data empiris. Melalui metode kuantitatif, setiap variabel dijabarkan ke dalam indikator yang dapat diukur sehingga memudahkan proses analisis statistik dan interpretasi hasil penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan sasaran responden aparatur yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai perangkat daerah yang berada pada unit kerja pengelola keuangan seperti bendahara, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan pejabat penatausahaan barang. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi aparatur yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam pengelolaan keuangan daerah serta pernah terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Kuesioner terdiri dari empat bagian utama, yaitu pernyataan terkait pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Setiap item diukur menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Penyusunan pernyataan dilakukan melalui proses validasi isi dengan melibatkan ahli di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan bahwa instrumen mencerminkan konsep teoretis secara tepat.

Sebelum penyebaran kuesioner secara luas, dilakukan uji coba (pilot test) terhadap sejumlah responden yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian. Uji coba ini bertujuan untuk menilai kejelasan item, konsistensi internal, serta kesesuaian skala pengukuran. Hasil uji coba kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson untuk menilai apakah setiap item memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total variabel. Sementara itu, uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha digunakan untuk memastikan bahwa item-item dalam satu variabel menunjukkan tingkat konsistensi yang memadai. Nilai Cronbach Alpha di atas 0,70 dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas.

Proses pengumpulan data utama dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui media digital kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Peneliti melakukan koordinasi dengan kepala perangkat daerah untuk memastikan kuesioner diterima dan diisi dengan tepat. Data yang diperoleh kemudian diperiksa kelengkapannya sebelum masuk ke tahap analisis. Data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria kualitas data dikeluarkan dari pengolahan lebih lanjut untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban pada setiap variabel. Analisis ini mencakup penghitungan nilai rata-rata, standar deviasi, serta kecenderungan umum responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Analisis deskriptif memberikan pemahaman awal mengenai sejauh mana pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi SDM telah diterapkan dalam konteks Pemerintah Kabupaten Asahan.

Tahap berikutnya adalah pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat sebelum melakukan analisis regresi. Asumsi yang diuji meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi residual memenuhi kriteria regresi linear. Multikolinearitas diuji untuk memastikan bahwa antarvariabel independen tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi, yang dapat mengganggu estimasi model. Sementara itu, pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual bersifat homogen. Jika asumsi tidak terpenuhi, dilakukan transformasi data atau penggunaan metode statistik alternatif.

Untuk menguji pengaruh antarvariabel utama, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Model regresi yang digunakan melibatkan variabel independen berupa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi, serta variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi diinterpretasikan untuk memahami arah dan kekuatan hubungan antara variabel.

Pengujian variabel moderasi dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam analisis Moderated Regression Analysis, variabel interaksi dibentuk dengan mengalikan variabel independen dan variabel moderasi. Model regresi kemudian dianalisis untuk melihat apakah variabel interaksi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai koefisien determinasi (R^2). Peningkatan R^2 yang signifikan menandakan bahwa variabel moderasi memiliki peran dalam hubungan antarvariabel.

Hasil analisis regresi dan Moderated Regression Analysis ditafsirkan secara komprehensif dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) dan koefisien regresi pada setiap tahap. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hubungan dianggap signifikan secara statistik. Interpretasi ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mendukung pembahasan mengenai hubungan conceptual antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan meminta persetujuan dari responden serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan cara pengisian kuesioner. Data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian akademik dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin.

Dengan metode penelitian yang terstruktur dan menggunakan pendekatan statistik yang tepat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil empiris yang valid mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, desain penelitian ini memungkinkan replikasi pada daerah lain untuk memperluas pemahaman mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan

Analisis deskriptif terhadap pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran umum mengenai posisi masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis inferensial. Analisis deskriptif juga membantu mengidentifikasi pola kecenderungan jawaban responden, tingkat persepsi terhadap variabel penelitian, serta potensi masalah yang mungkin memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti dijelaskan oleh Wibowo (2018), analisis deskriptif merupakan tahap awal yang memberikan dasar interpretasi terhadap kondisi empiris, sehingga peneliti mampu memahami konteks yang memengaruhi hubungan antarvariabel.

Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan merupakan variabel penting karena standar inilah yang menjadi pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori pemahaman tinggi, terutama terkait prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryaningsih (2021) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah daerah semakin familiar dengan standar akuntansi pemerintahan sejak penerapan basis akrual secara penuh pada tahun 2015. Pemahaman tinggi pada aspek dasar seperti pengakuan pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah cukup efektif. Namun, masih terdapat responden yang menunjukkan pemahaman sedang pada materi teknis seperti pengukuran kewajiban jangka panjang dan penyajian aset tetap. Menurut Utami (2020), aspek teknis SAP sering kali membutuhkan pengalaman praktis yang lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan proses rekonsiliasi dan konsolidasi data antarunit kerja.

Variabel berikutnya adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi, khususnya aplikasi keuangan pemerintah daerah seperti SIPKD atau SIMDA. Secara deskriptif, nilai rata-rata menunjukkan bahwa mayoritas responden memanfaatkan sistem informasi akuntansi pada tingkat tinggi, terutama dalam proses pencatatan transaksi, verifikasi data, dan penyusunan laporan. Menurut penelitian Yulianingsih (2019), pemanfaatan sistem informasi yang optimal dapat mengurangi risiko human error, mempercepat proses penyajian laporan, serta meningkatkan akurasi data keuangan. Responden menunjukkan persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan sistem, ketersediaan menu yang lengkap, dan keandalan aplikasi dalam menghasilkan laporan otomatis. Namun demikian, beberapa responden menyampaikan persepsi sedang pada indikator kualitas jaringan dan stabilitas sistem, menunjukkan bahwa faktor infrastruktur masih memiliki pengaruh dalam menentukan efektivitas penggunaan aplikasi

keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan Pratomo (2018) yang menekankan pentingnya dukungan teknologi dan kualitas layanan TI dalam mendukung performa sistem akuntansi pemerintahan.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi juga menunjukkan kecenderungan menarik. Secara umum, kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori baik hingga sangat baik, terutama pada aspek pengetahuan teknis akuntansi pemerintahan dan pemahaman terhadap regulasi keuangan. Responden juga menunjukkan kemampuan cukup tinggi dalam pengoperasian sistem informasi akuntansi, yang mencerminkan peningkatan kompetensi digital aparatur pemerintah daerah. Menurut Lestari (2022), peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor publik merupakan hasil dari intensitas pelatihan yang semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun pemerintah daerah. Meskipun demikian, terdapat responden yang menunjukkan kompetensi sedang pada aspek analitis, seperti kemampuan memahami implikasi transaksi kompleks terhadap laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Yuniarti (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi analitis membutuhkan pengalaman panjang dan tidak hanya bergantung pada pelatihan formal.

Peran kompetensi sumber daya manusia terlihat jelas dalam pola deskriptif, di mana responden dengan kompetensi tinggi menunjukkan kecenderungan menilai lebih positif hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi bertindak sebagai elemen penguat, karena sumber daya manusia yang kompeten mampu mengintegrasikan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi secara efektif. Menurut Rahmawati (2020), peran kompetensi sumber daya manusia tidak hanya memengaruhi proses pencatatan, tetapi juga menentukan interpretasi dan analisis data keuangan sehingga menghasilkan laporan yang lebih informatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif memberikan gambaran bahwa kondisi empiris Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan kecenderungan positif dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia. Keempat variabel ini secara umum berada pada kategori tinggi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Analisis deskriptif ini menjadi dasar penting bagi peneliti dalam melanjutkan ke tahap analisis regresi dan uji moderasi untuk menguji hubungan kausal secara lebih mendalam.

Pengujian Asumsi Klasik dan Evaluasi Kelayakan Model Statistik dalam Menguji Hubungan Antarvariabel

Pengujian asumsi klasik merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis statistik, khususnya ketika penelitian menggunakan metode regresi linear berganda atau Moderated Regression Analysis. Tahap ini diperlukan untuk memastikan bahwa model yang dibangun tidak mengalami pelanggaran asumsi-asumsi dasar sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara akurat dan tidak bias. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, pengujian ini menjadi fundamental karena kualitas data dan validitas model akan menentukan sejauh mana hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara empiris. Menurut Wibowo (2020), ketepatan model dalam penelitian kuantitatif sangat dipengaruhi oleh pemenuhan asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

Langkah pertama dalam pengujian asumsi klasik adalah uji normalitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Residual yang berdistribusi normal akan memberikan jaminan bahwa koefisien regresi yang diperoleh tidak terdistorsi. Normalitas data dapat diperiksa melalui uji Kolmogorov–Smirnov ataupun Shapiro–Wilk, serta visualisasi seperti histogram dan normal probability plot. Apabila nilai signifikansi uji normalitas lebih besar dari 0.05, maka data dianggap berdistribusi normal. Hal ini penting karena data yang tidak normal sering kali menyebabkan penyimpangan hasil regresi sehingga tidak dapat mencerminkan hubungan sebenarnya antarvariabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Hariani (2021), normalitas residual menjadi indikator utama bahwa model regresi layak diteruskan pada tahap analisis berikutnya.

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas, yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan multikolinearitas, karena hal tersebut akan memengaruhi stabilitas koefisien regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF yang berada di bawah 10 dan Tolerance di atas 0.10 menunjukkan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini menjadi penting dalam penelitian ini karena variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpotensi memiliki kedekatan konsep, sehingga perlu dipastikan bahwa keduanya tidak saling memengaruhi secara ekstrem. Menurut Lestari (2019), multikolinearitas dapat mengaburkan pengaruh nyata suatu variabel independen dan menyebabkan interpretasi yang salah dalam penelitian.

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian berikutnya yang tidak kalah penting. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak sama pada seluruh level variabel independen. Kondisi ini menyalahi asumsi dasar regresi yang mengharuskan varian residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji Glejser atau Breusch–Pagan. Apabila nilai signifikansi uji berada di atas 0.05, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian keuangan sektor publik, heteroskedastisitas sering muncul karena perbedaan tingkat kemampuan pegawai dalam memahami prosedur akuntansi, sehingga memengaruhi konsistensi data. Menurut Maryati (2022), model regresi dengan heteroskedastisitas berpotensi menghasilkan standard error yang bias, sehingga uji signifikansi menjadi tidak akurat. Karena itu, memastikan tidak adanya heteroskedastisitas merupakan tahap penting sebelum menarik kesimpulan mengenai hubungan antarvariabel.

Uji autokorelasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa residual suatu observasi tidak berkorelasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi biasanya muncul pada data runtut waktu, tetapi juga dapat terjadi pada data lintas sektoral dalam konteks birokrasi apabila terdapat pola tertentu yang tidak terdeteksi oleh model. Pengujian ini menggunakan Durbin–Watson (DW). Nilai DW yang berada antara 1.5 hingga 2.5 menunjukkan bahwa model bebas dari autokorelasi. Apabila terjadi autokorelasi, hasil estimasi model akan bias dan tidak reliabel. Dalam penelitian mengenai laporan keuangan pemerintahan, autokorelasi bisa muncul karena adanya keseragaman prosedur administrasi yang dilakukan oleh unit perangkat daerah. Menurut Pratama (2020), autokorelasi akan mengurangi keakuratan prediksi model sehingga uji ini tidak dapat diabaikan.

Ketika penelitian menggunakan Moderated Regression Analysis, evaluasi model juga mencakup pengujian interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Interaksi ini digunakan untuk melihat apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Dalam model moderasi, kelayakan model dilihat dari perubahan nilai R^2 dan signifikansi koefisien interaksi. Menurut Nugroho (2018), variabel moderasi yang efektif akan meningkatkan nilai R^2 model secara signifikan dan menunjukkan koefisien interaksi yang signifikan.

Secara keseluruhan, pengujian asumsi klasik dan evaluasi kelayakan model dalam penelitian ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh analisis statistik dilakukan dengan standar metodologis yang tepat. Pemahaman terhadap asumsi ini memungkinkan peneliti mendapatkan hasil yang tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga valid secara konseptual. Mengingat penelitian ini berfokus pada sektor publik dengan karakteristik birokrasi yang kompleks, ketelitian metodologis menjadi syarat utama untuk menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Hartono (2022), kualitas metodologi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian. Dengan demikian, pemenuhan asumsi klasik dan evaluasi kelayakan model menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan pembahasan mengenai hubungan antarvariabel penelitian, sekaligus menjadi jaminan bahwa hasil analisis dapat dijadikan dasar dalam peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Moderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sekaligus memastikan bagaimana kompetensi sumber daya manusia berperan sebagai variabel moderasi. Analisis ini menjadi inti dari keseluruhan penelitian karena memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana variabel-variabel tersebut saling memengaruhi dalam kerangka tata kelola keuangan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, regresi linear berganda dijalankan terlebih dahulu untuk melihat pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, Moderated Regression Analysis digunakan untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Menurut Kurniasih (2020), penggunaan moderated regression analysis sangat tepat dalam penelitian manajemen sektor publik karena mampu mengidentifikasi peran faktor kontekstual yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan akuntansi.

Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman aparatur terhadap prinsip, prosedur, dan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafitri (2018) yang menemukan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akrual merupakan determinan penting dalam penyusunan informasi keuangan pemerintah. Pemahaman yang memadai memungkinkan pegawai untuk mencatat transaksi

sesuai aturan, mengidentifikasi objek pelaporan, serta menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Kabupaten Asahan, hasil ini memperlihatkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak hanya sekadar persyaratan administratif, namun juga faktor teknis yang memainkan peran strategis dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penggunaan sistem informasi yang efektif meningkatkan ketepatan pencatatan, mempercepat proses pengolahan data, serta mengurangi risiko kesalahan input data. Temuan ini sejalan dengan pendapat Widodo (2021) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai instrumen yang meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja pegawai pemerintah dalam mengolah data keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika sistem informasi akuntansi dimanfaatkan secara optimal, kualitas laporan keuangan akan meningkat secara nyata, terutama dalam hal ketepatan waktu penyajian, keandalan data, dan kemudahan penyusunan laporan pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi bukan hanya alat bantu administratif, melainkan komponen struktural yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) dalam model regresi menunjukkan bahwa gabungan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi mampu menjelaskan porsi yang cukup besar dari variasi kualitas laporan keuangan. Ini menandakan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Menurut Pramesti (2019), semakin besar nilai R^2 dalam penelitian tata kelola keuangan sektor publik, semakin kuat pula hubungan antara variabel-variabel yang diuji, sehingga hasil penelitian memiliki implikasi praktis yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan.

Tahap berikutnya adalah pengujian moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis. Teknik ini dilakukan dengan menambahkan interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan variabel independen, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil analisis, kompetensi sumber daya manusia terbukti memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan. Koefisien interaksi menunjukkan nilai positif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, semakin kuat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan pendapat Setiawan (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi pegawai merupakan faktor yang menentukan efektivitas penerapan prinsip akuntansi dalam sektor pemerintahan. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi mampu menginterpretasikan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan secara lebih tepat, serta mampu menerapkan prosedur akuntansi dalam situasi operasional yang kompleks.

Kompetensi sumber daya manusia juga terbukti memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien interaksi antara kedua variabel signifikan, sehingga kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dengan kata lain, meskipun sistem informasi akuntansi telah tersedia, kualitas laporan keuangan tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh pegawai yang kompeten. Temuan ini konsisten dengan penelitian Dewi (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Pegawai yang kompeten mampu memahami fitur sistem, memanfaatkan fasilitas pencatatan secara akurat, serta menangani kesalahan input atau gangguan teknis yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya pelengkap, tetapi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, hasil Moderated Regression Analysis memperkuat argumentasi bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Tanpa kompetensi yang memadai, peningkatan pemahaman standar akuntansi pemerintahan ataupun penggunaan sistem informasi akuntansi tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Kasmir (2019), kompetensi sumber daya manusia merupakan bagian dari kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa organisasi pemerintah daerah perlu menempatkan aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai prioritas dalam strategi peningkatan kualitas laporan keuangan.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan di Kabupaten Asahan. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pelatihan standar akuntansi pemerintahan dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan sistem informasi akuntansi secara berkelanjutan. Pelatihan yang sistematis dan berjenjang akan membantu pegawai memahami kebijakan akuntansi berbasis akrual, sekaligus meningkatkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan aplikasi

keuangan daerah. Menurut Handayani (2021), peningkatan kompetensi secara berkelanjutan akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas kerja dan kualitas informasi yang dihasilkan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap kelayakan perangkat teknologi, kecepatan pemrosesan data, integrasi antarunit kerja, serta keamanan data keuangan. Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan telah memenuhi standar operasional yang sesuai dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada akhirnya, hasil analisis regresi dan pengujian moderasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dapat dicapai melalui satu aspek saja. Diperlukan sinergi antara peningkatan pemahaman standar akuntansi pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor pendukung. Ketiganya merupakan elemen struktural dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tanpa kompetensi yang memadai, sistem informasi yang canggih dan standar akuntansi yang jelas tidak akan mampu menghasilkan kualitas laporan yang optimal. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahayu (2022), kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari kombinasi pengetahuan, keterampilan, prosedur, dan teknologi yang dikelola secara selaras dalam sebuah organisasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting dalam memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menunjukkan peran krusial kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Asahan dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan sejumlah kesimpulan penting yang dapat dijadikan dasar penguatan pengelolaan keuangan daerah. Temuan empiris menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan individu, pemahaman regulasi, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Kesimpulan pertama menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual mampu menerapkan standar tersebut secara lebih tepat dan konsisten dalam proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi fondasi penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Asahan sudah berada pada jalur yang benar, meskipun tetap memerlukan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Hasil ini menegaskan bahwa regulasi hanya dapat diterapkan secara efektif apabila pegawai memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami substansi standar akuntansi pemerintahan.

Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah terbukti mempermudah proses pencatatan transaksi, mempercepat rekonsiliasi data, dan meningkatkan akurasi informasi keuangan. Hasil ini memperlihatkan bahwa teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pegawai dapat bekerja lebih sistematis, terkontrol, dan minim kesalahan. Temuan ini juga memperlihatkan perlunya pemerintah daerah menjaga stabilitas sistem, memperbaiki kualitas jaringan, serta memastikan ketersediaan dukungan teknis untuk meminimalkan gangguan dalam pengelolaan data keuangan.

Kesimpulan ketiga berkaitan dengan variabel moderasi, yaitu kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai dengan kompetensi yang lebih tinggi mampu mengintegrasikan pemahaman standar akuntansi dengan pemanfaatan teknologi secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga faktor penentu keberhasilan

penyusunan laporan keuangan. Kompetensi yang dimaksud mencakup aspek teknis akuntansi, kemampuan analitis, serta keterampilan pengoperasian sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur, semakin besar kemampuan mereka untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sementara kompetensi sumber daya manusia berperan memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan hanya dapat dicapai melalui penguatan simultan pada tiga aspek: peningkatan kapasitas pemahaman standar akuntansi pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Ketiga faktor ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam praktik penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkala, pendampingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Selain itu, keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi perlu didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur teknologi serta integrasi sistem antarperangkat daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Dengan temuan ini, penelitian memberikan kontribusi penting bagi literatur mengenai pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia, serta menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B.Setiawan, R. P. T. (2020). Pengaruh Penerapan SAP dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akunida*, Volume 4 N(2442-3033), 76-89. <https://doi.org/10.4135/9781412983907.n1200>.
- Apriliyanti, Rina. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–120.
- Ardiansyah, Fajar Rahmat. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(1), 55–67.
- Astuti, Wulan. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Mutu Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 45–58.
- Damayanti, Nur Indah. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(3), 221–230.
- Dewi, Siti Nurhayati. (2019). Peran Kompetensi Aparatur dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 76–84.
- Fauziah, Dina Lestari. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kesiapan Teknologi pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 7(2), 88–99.
- Gunawan, Ahmad Rizqi. (2019). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 3(1), 17–29.
- Hakim, Rizky Abdul. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Kinerja Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 33–42.
- Halimah, Nur Farida. (2022). Pengaruh Kualitas SDM dan Pemahaman SAP terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan SKPD. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 122–134.
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14-23.
- Hidayah, Lailatul. (2019). Kompetensi SDM dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Informatika Publik*, 3(2), 144–156.
- Husi, S. M. N. P., & Saparuddin, S. Y. (2025). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(April), 1-8.
- Iskandar, Muhammad. (2021). Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peningkatan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Kebijakan dan Akuntabilitas Publik*, 5(3), 175–186.

- Kurniawati, E., & Askandar, N. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Pemerintahan Kota Batu). *E-Jra*, 09(08), 1-16.
- Lutfiani, Rika. (2020). Analisis Kompetensi Aparatur dalam Pemanfaatan SIPD pada Pemerintah Kabupaten. *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, 6(1), 49–60.
- Marpaung, Risa Melati. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 201–213.
- Ningsih, Tri Wahyuni. (2022). Sistem Informasi Akuntansi, Literasi Teknologi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Terapan*, 7(1), 58–70.
- Pratiwi, Desi Amanda. (2020). Pengaruh Pemahaman SAP dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 19–30.
- Rahman, Dedi Suryadi. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi dan Keuangan Negara*, 5(1), 33–47.
- Ramadhan, M. Z., & Nurabiah, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD BPKADA Pemerintahan Kota Bima). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.46576/bn.v7il.4284>
- Setiawan, Agus Budi. (2019). Analisis Kendala Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 101–115.
- Sitorus, Melinda Grace. (2020). Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tantangan Implementasi di Lingkungan SKPD. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 8(3), 189–200.
- Suprihatin, N. S., & Ananthy, A. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242. <https://doi.org/10.35448/jart.v12i2.6218>.
- Wijayanti, Sarah Oktaviana. (2021). Keterkaitan Kompetensi SDM, Pengendalian Internal, dan Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Publik*, 12(1), 59–73.
- Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(1), 64-88. <https://doi.org/10.37385/raj.v1il.34>.
- Yuliana, Maya Sari. (2020). Pengaruh Pemanfaatan SIPD dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 6(3), 140–152.